



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2013
NOMOR : 1092/SJ/IX/2013**

Dalam rangka mengisi formasi CPNS Tahun Anggaran 2013, Komisi Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia, pria dan wanita lulusan Sarjana (S1) dan Diploma (D-III), sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 209 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2013, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

I. JUMLAH FORMASI

NO.	UNIT KERJA/ SEKRETARIAT KPU	KODE PENDIDIKAN (KP)	SARJANA (S-1)		JUMLAH FORMASI	KODE PENDIDIKAN (KP)	SARMUD (D-III)		JUMLAH FORMASI
			KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NAMA JABATAN			KUALIFIKASI PENDIDIKAN (KP)	NAMA JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	SEKRETARIAT JENDERAL KPU				16				14
		01 01	Ekonomi Akuntansi	Auditor Pelaksana, Penata Laporan keuangan, Penyusun Laporan Keuangan	6	01 07	Akuntansi	Verifikator Keuangan	3
		01 02	Ilmu Hukum **)	Analisis Hukum	3	01 08	Desain Komunikasi Visual	Animator, Ilustrator	2
		01 03	Ilmu Politik	Analisis Pemilu	1				
		01 04	Komputer	Penata Laporan Keuangan, Pranata Komputer	2	01 09	Kearsipan **)	Arsiparis **)	5
		01 05	Komunikasi/Ilmu Politik *)	Penghubung Antar Lembaga *)	2	01 10	Komputer **)	Operator Komputer, Verifikator Keuangan **)	4
		01 06	Psikologi	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	2				
B.	SEKRETARIAT KPU PROVINSI				37				30
1.	NUSA TENGGARA TIMUR				3				2
		02 03	Ilmu Politik	Analisis Pemilu	1	02 10	Komputer	Teknis Penyelenggara Pemilu	2
		02 01	Ekonomi Akuntansi	Analisis Pemilu	2				
2.	GORONTALO				5				
		03 04	Komputer	Analisis Pemilu	2				
		03 01	Ekonomi Akuntansi	Analisis Pemilu, Teknis Penyelenggara Pemilu	3				
3.	SULAWESI UTARA				3				5
		04 01	Ekonomi Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu, Analisis Pemilu	2	04 07	Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu	2
		04 02	Ilmu Hukum	Analisis Pemilu	1	04 10	Komputer	Teknis Penyelenggara Pemilu	3
4.	SULAWESI TENGGARA				1				5
		05 02	Ilmu Hukum	Analisis Pemilu	1	05 10	Komputer	Analisis Pemilu	1
						05 07	Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu	4
5.	MALUKU				4				3
		06 03	Ilmu Politik	Analisis Pemilu	2	06 07	Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu	2
		06 04	Komputer	Analisis Pemilu	1	06 10	Komputer	Analisis Pemilu	1
		06 02	Ilmu Hukum	Analisis Pemilu	1				
6.	MALUKU UTARA				4				4
		07 04	Komputer	Analisis Pemilu	3	07 10	Komputer	Teknis Penyelenggara Pemilu, Analisis Pemilu	3
		07 01	Ekonomi Akuntansi	Analisis Pemilu	1	07 07	Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu	1
7.	PAPUA				10				10
		08 04	Komputer	Analisis Pemilu	5	08 07	Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu	8
		08 01	Ekonomi Akuntansi	Analisis Pemilu	3	08 10	Komputer	Teknis Penyelenggara Pemilu	2
		08 02	Ilmu Hukum	Analisis Pemilu	2				
8.	PAPUA BARAT				7				1
		09 04	Komputer	Analisis Pemilu	2	09 07	Akuntansi	Teknis Penyelenggara Pemilu	1
		09 01	Ekonomi Akuntansi	Analisis Pemilu	2				
		09 02	Ilmu Hukum	Analisis Pemilu	2				
		09 03	Ilmu Politik	Analisis Pemilu	1				
JUMLAH					53				44

II. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI dan POLRI;
 - c. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - g. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat.
2. Persyaratan Khusus, meliputi:
 - a. Batas usia pelamar minimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2013 :
 - 1) Untuk pelamar berpendidikan Sarjana Muda/D3 maksimal berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - 2) Untuk pelamar berpendidikan Strata Satu/S1 maksimal 30 (tiga puluh) tahun (batasan usia pelamar dibuktikan melalui data dalam ijazah dan akta kelahiran);
 - b. Akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk pelamar Tingkat Pendidikan Sarjana Muda/D3 dan Sarjana (S1), yaitu:
 - 1) Minimal Akreditasi B untuk Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Negeri Swasta (PTS);
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 - a) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) minimal 2,90
 - b) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) minimal 3,00;
 - c. Memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office.
 - e. Khusus bagi pelamar disabilitas dapat melamar untuk formasi Sekretariat Jenderal KPU dengan bidang studi S1 Hukum, D3 Komputer, dan D3 Kearsipan **);
 - f. Khusus 1 (satu) formasi Sekretariat Jenderal KPU dengan bidang studi S1 Komunikasi atau S1 Ilmu Politik, diperuntukkan bagi pelamar putra/putri Papua dengan persyaratan bahwa salah satu orang tuanya adalah asli Papua *);
 - g. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat di kemudian hari apabila pada saat melamar sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan;
 - h. Persyaratan umum dan khusus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,- dengan format yang dapat diunduh di website Komisi Pemilihan Umum : www.kpu.go.id.

III. KETENTUAN PENDAFTARAN / BERKAS LAMARAN

1. Berkas lamaran dikirim langsung ke tempat penerimaan berkas yang telah ditentukan dalam pengumuman penerimaan dan atau mekanisme pengiriman lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Tim Pengadaan CPNS, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam bermeterai Rp 6.000,- dan alamat pelamar harus ditulis lengkap dengan mencantumkan Kode Pendaftaran yang ditujukan : (contoh Surat Lamaran dapat di-download di www.kpu.go.id)
 - 1) Untuk formasi Sekretariat Jenderal KPU kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum up. Panitia Pengadaan CPNS Setjen KPU Tahun Anggaran 2013 : (contoh Surat Lamaran dapat di-download di www.kpu.go.id);
 - 2) Untuk formasi Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota kepada :
 - a) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Gorontalo;
 - c) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Sulawesi Utara;
 - d) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Maluku;
 - f) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Maluku Utara;
 - g) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Papua;
 - h) Sekretaris Jenderal up. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi Papua Barat;
 - b. **Foto copy** Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. **Foto copy** surat keterangan akreditasi Program Studi terbaru yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. **Asli dan Foto copy** dilegalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

- e. **Foto copy** Surat Keterangan Sehat dari **dokter pemerintah (Puskesmas/RS Pemerintah)** yang masih berlaku;
- f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pada bagian belakang foto ditulis nama pelamar;
- g. **Foto copy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- h. Dalam berkas lamaran, **WAJIB** melampirkan Surat Pernyataan poin b, c, d, dan e pada **PERSYARATAN UMUM**, dan Surat Pernyataan dapat di *download* pada website KPU : www.kpu.go.id
- i. Surat lamaran beserta lampirannya disusun rapi dan dimasukkan ke dalam stopmap snelhechter folio berdasarkan kelompok formasi yang dibutuhkan yaitu map warna biru untuk Sarjana (S1) dan map kuning untuk Diploma (D III) serta dimasukan ke dalam amplop coklat dengan mencantumkan formasi yang dipilih, kode program studi, pada pojok kiri atas;
- j. Berkas lamaran tersebut di atas disampaikan :
 - 1) Untuk formasi Sekretariat Jenderal KPU melalui **PO BOX 1130 JKP 10011**;
 - 2) Untuk formasi Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota disampaikan ke masing-masing Sekretariat KPU Provinsi dan atau PO BOX yang telah ditentukan, berdasarkan pengumuman baik melalui media lokal / website / papan pengumuman di masing-masing Sekretariat KPU Provinsi

IV. JADWAL, MATERI DAN LAIN-LAIN

1. Penerimaan lamaran dimulai pada tanggal **15 s.d 30 September 2013** (cap pos);
2. Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi bagi yang memenuhi syarat akan diumumkan di website Sekretariat Jenderal KPU www.kpu.go.id dan website KPU Provinsi, pada tanggal **3 Oktober 2013**;
3. Pelamar yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi dapat langsung mengambil Kartu Tanda Peserta ujian, pada tanggal **9 s.d 10 Oktober 2013** mulai pukul **08.00 WIB s/d 16.00 WIB**, dengan menunjukan KTP yang bersangkutan dan membawa foto 3 x 4 berwarna 1 lembar (tempat pengambilan Kartu Peserta Ujian ada dalam pengumuman peserta yang lulus seleksi administrasi);
4. Bagi peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi hak milik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan dilaksanakan serentak pada hari Minggu tanggal **3 Nopember 2013** (waktu dan tempat/denah ada dalam pengumuman peserta yang lulus seleksi administrasi);
6. Seleksi melalui 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi
 - b. Tes Kemampuan Dasar (TKD)
 - c. Tes Kemampuan Bidang (TKB) terdiri dari:
 - Test Tertulis, Psikotest, dan Wawancara (Sekretariat Jenderal KPU);
 - Test Tertulis dan Psikotest (Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota).
7. Pelamar atau peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak dipungut biaya.;
8. Keputusan Tim Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Tahun Anggaran 2013, bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil hasil penerimaan Tahun Anggaran 2013 akan ditempatkan pada Kantor Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mengisi kebutuhan sesuai dengan formasi yang ditetapkan dan bagi yang dinyatakan diterima sebagai CPNS tidak dapat menolak penempatan dengan alasan apapun.

Jakarta, September 2013

PANITIA PENGADAAN CPNS
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 TAHUN ANGGARAN 2013